Sketsa Bisnis Volume (7) No (2) (2020) pp (130-137)

JURNAL SKETSA BISNIS

*Naskah Diterima : 1 Oktober 2020
Diterima Publikasi : 20 Desember 2020*

Journal Homepage

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>

Kebijakan Partisipatif Pemerintah dalam Rangka memenuhi Visi Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

Khoirul Huda

¹ Universitas Yudharta, Indonesia

Abstract

One of the objectives of the state being established is to protect life and advance the welfare of the nation, so the government is obliged to help fulfill the basic rights of society. The high mortality rate for mothers and newborns is not just a matter of fate, but something that is done by humans. The maternal and newborn mortality rate in Indonesia is the highest compared to other countries in ASEAN. In response to this, the Pasuruan Regency Government responded by making a policy in the form of the establishment of the Penakib Forum which has a vision to make Pasuruan district a safe, safe and pleasant place for every pregnant woman and newborns. This forum consists of all cross-sectoral components, namely consisting of the health office, referral hospitals, puskesmas, village midwives, health cadres, and community organizations in Pasuruan Regency. This vision is in accordance with the regional medium-term development plan (RPJMD) for 2018 - 2023 which carries the vision "The realization of a Prosperous, Maslahat and competitive Pasuruan Regency".

Keywords: Participatory policies, penakib forums, reduction in mortality

Abstrak

Negara didirikan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan memajukan kesejahteraan bangsa, maka pemerintah berkewajiban membantu memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir bukan sekedar bicara takdir, namun ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan negaralain di ASEAN. menganggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespon dengan membuat kebijakan dalam bentuk pendirian Forum penakib yang memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan menjadi tempat yang aman, selamat dan menyenangkan bagi setiap ibu hamil dan bayi baru lahir. Forum ini terdiri dari seluruh komponen lintas sektoral, yaitu terdiri dari dinas kesehatan, rumah sakit rujukan, puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, serta organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Visi ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 yang mengusung Visi " Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing".

Kata kunci: Kebijakan partisipatif, forum penakib, penurunan kematian

*) Penulis Korespondensi: hudarecht@yudharta.ac.id

1. Pendahuluan

Negara sebagai pemegang mandat dari kedaulatan rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat konstitusi sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia. UUD tahun 1945 sebagai konstitusi merupakan landasan hukum yang fundamental (Fundamental Norm) dalam merumuskan arah dan dasar pengambilan kebijakan sosial, politik, dan hukum (Rohidin, 2016).

Negara sebagai organisasi kekuasaan tentunya selalu mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan umum. Hal tersebut kiranya juga menjadi tujuan dibentuknya Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mahluddin, 2019).

Secara tegas tujuan Negara Indonesia tersebut mencerminkan beberapa tujuan

nasional bangsa Indonesia. Tujuan yang termaktub dalam alinea keempat ini merupakan janji konstitusi negara Indonesia kepada segenap bangsanya sekaligus menjadi hak dasar (basic right) rakyatnya. Oleh karena itu Negara berkewajiban melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan dan memenuhi hak-hak konstitusional warganya termasuk dalam hal perlindungan dan pelayanan kepada ibu melahirkan (Huda, 2014).

Peningkatan kesehatan ibu di Indonesia dirasa mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan *maternal mortality rate* yang selalu menjadi isu penting dalam dunia kesehatan khususnya ibu dan anak. Berdasarkan data UNICEF Indonesia, setiap satu jam terdapat perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan atau karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan. Maternal Mortality Rate adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu atau Maternal Death menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cidera (Nolen, 2006).

2. Tinjauan Teoritis

Kebijakan pemerintah bagi perusahaan memiliki fungsi dalam membantu perusahaan mengubah model bisnis, membantu dalam berinvestasi dengan tujuan memperbaiki lingkungan dan mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Moorman, *et al.*, 1993; Rakhmawati, Rahardjo, & Kusumawati, 2019) hal ini sama seperti kebijakan yang diperuntukkan masyarakat, yang berfungsi untuk melindungi dan

mensejahterakan lingkungan. Kebijakan merupakan satu hal yang harus di laksanakan, tanpa kebijakan suatu daerah tidak memancarkan karakteristik, baik karakteristik ekonomi, masyarakat, maupun budaya (Simarmata, 2015). Dalam menentukan tugas dan tanggung jawab sebagai kepada daerah, menentukan visi-misi dan menjalankannya adalah sebuah kewajiban yang mutlak (Arsyad, 2002). Dengan visi misi tersebut, maka akan tercipta struktur kerja yang dapat di nilai dengan baik atau buruknya pemerintahan. pemerintahan yang baik harus memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut (Gischa, 2020).

Begitu juga masyarakat, harus mendukung pemerintah dalam menjalankan visi, misi tersebut, karena sebenarnya peran serta masyarakat sangat menentukan (Pemerintah RI, 2009). Hal inilah yang menjadi tujuan pemerintah dalam membuat visi misi pemerintah, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat (M, 2019).

3. Metode

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru (Rohidin, 2016).

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada gejala yang timbul dalam masyarakat dengan penelitian terhadap data primer lapangan yang dilakukan dengan melihat gejala yang timbul dalam objek penelitian, atau

terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat (Abdul Kadir, 2015).

Penulisan ini akan fokus terhadap strategi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kebijakan partisipatif dengan cara membentuk forum penakib yang melibatkan seluruh stakeholder dengan cara partisipasi aktif dari kelompok masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Pasuruan (Pribadiono, 2014).

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu negara harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut, karena pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, yang menyebutkan : "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Berdasarkan dari amanah itu, maka di jabarkan lebih lanjut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Adapun Prioritas Pembangunan dibidang Kesehatan adalah (Handoyo, 2012):

1. Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi)
2. Perbaikan Gizi khususnya Stunting
3. Pengendalian Penyakit Menular : HIV/ AIDS, Tuberkulosis & Malaria
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker).

Disisi lain kesehatan ibu merupakan target dalam Millenium Development Goals (MDGs). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Namun seiring berjalannya

waktu target ini belum bisa dicapai secara maksimal. Sehingga dalam kelanjutannya program ini masuk dalam *Sustainability Development Goals (SDGs)*.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kematian ibu adalah dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan keluarga dan pendekatan gerakan masyarakat (Germas). Dimana dalam gerakan masyarakat melibatkan sektor kesehatan di pusat dan daerah, lintas sektor terkait, organisasi profesi, akademisi, lembaga sosial kemasyarakatan, media massa, dunia usaha dan mitra pembangunan.

Berdasarkan problematika diatas, maka pemerintah daerah saat ini didalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 mengusung Visi “ Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing”. Selanjutnya Visi ini di terejawantahkan kedalam beberapa misi, yaitu (Fibriyani & Mufidah, 2018);

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Fakta saat ini adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan memiliki problematika terkait tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan selalu ada di peringkat nomor tiga dari 38 kota/Kabupaten se Jawa timur untuk kematian ibu dan bayi baru lahir. Pada tahun 2018 angka kematian ibu di Jawa timur sejumlah 522 orang, sedangkan untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak 28 orang terhitung sampai tanggal 6 pebruari 2019. Angka ini menjadikan Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ketiga setelah Jember dengan jumlah 41 selanjutnya kota Surabaya sebanyak 31 orang.¹ adapun penyebab tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Pasuruan sebagaimana data dari dinas kesehatan sebagaimana dibawah ini:

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2019

Gambar 1. Penyebab Tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasuruan

¹ Data diperoleh dari dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya daerah atau Kecamatan yang mengalami angka kematian ibu adalah sebagai berikut;

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2019

Gambar 2. Kecamatan yang Mengalami Angka Kematian Ibu

Dari banyaknya angka kematian ibu diatas, selanjutnya diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi kematian tersebut. Adapun upaya yang bisa segera dilakukan adalah perlu adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai instansi. Selanjutnya instansi yang perlu dilibatkan dalam penanggulangan atau dalam rangka meminimalisir angka kematian ibu tersebut terdiri dari:

- Fasilitas Kesehatan Pertama
- Fasilitas Kesehatan Rujukan Pertama. Kabupaten dan regional
- Keluarga Berencana
- Akses Pembiayaan /BPJS
- Motivator KIA masyarakat/ Ormas
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- Aparat pemerintah / kepolisian/Babinsa
- Koordinasi dan komunikasi antar fasilitas Kesehatan

Dari berbagai instansi diatas, diperlukan sebuah kesadaran dan paradigma yang sama dalam memandang problematika yang sedang dihadapi. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kematian ibu tidak semata mata hanya bicara taqdir, serta tidak sekedar hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui dinas kesehatan semata, namun lebih dari itu semua bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu seluruh instansi harus membangun kesadaran kolektif serta

saling bekerja sama dalam mengurangi angka kematian ibu. Salah satu kelompok yang sangat strategis adalah keberadaan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat memiliki posisi penting dalam hal memberikan edukasi dan penyebaran informasi tentang pentingnya pola hidup sehat serta upaya untuk mempersiapkan sematang mungkin terkait dengan rencana kelahiran bayi. Apalagi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang terkenal dengan budaya santrinya, mereka lebih memperhatikan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh informal daripada pejabat formal dari instansi pemerintah daerah itu sendiri (Rizal, Tinus, & Widodo, 2018b).

Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memberikan ruang dan peran serta mendorong adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Landasan yuridis terkait partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya dalam pasal 354 ayat 1 dan 2:

- 1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
 - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan

organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau

- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka salah satu strategi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi melahirkan melalui dinas kesehatan adalah membentuk forum PENAKIB. Forum ini merupakan wadah yang terdiri dari seluruh komponen lintas sektoral yang terdiri atas dinas kesehatan, rumah sakit rujukan, puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, serta organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Forum PENAKIB ini dikukuhkan oleh bapak bupati Pasuruan melalui sekretaris daerah pada hari senin, tanggal 17 desember 2018 yang bertempat di gedung Segoropuro, Pendopo Kabupaten Pasuruan. Adapun fungsi dan tugas forum ini adalah melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan serta melakukan sinergitas dalam pengaruh utama pencegahan resiko adanya kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Pasuruan. Adapun struktur pengorganisasian Forum Penakib adalah sebagaimana dibawah ini;

Sumber: PemkabPasuruan.co.id, 2020

Gambar 3. Pengorganisasian Forum Penakib

Berdasarkan struktur organisasi diatas, selanjutnya forum penakib sebagai sebuah wadah yang mengakomodir berbagai lintas stake holder memiliki visi dan misi sebagai berikut ini;

Visi :

Mewujudkan Kabupaten Pasuruan menjadi tempat yang aman , selamat dan menyenangkan bagi Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir

Misi :

Terciptanya Komunikasi , Koordinasi dan Kerjasama antara semua unsur pemberi layanan kesehatan , masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir.

Target dan Tujuan :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu 50 % dalam waktu 3 tahun.
2. Perbaikan ketrampilan petugas di Pelayanan Kesehatan Pertama dan Rujukan melalui penggunaan Standar Pelayanan pada 100 % pasien.
3. Perbaikan deteksi resiko tinggi dan penanganan awal yang tepat untuk kasus Preeklampsia dan Perdarahan Pasca salin pada 80 % pasien.
4. Setiap Ibu Hamil di Kabupaten Pasuruan tercatat dan dilakukan pendampingan terus menerus baik ibu dengan resiko tinggi maupun resiko rendah pada 100 % ibu hamil.
5. Perbaikan Pelayanan KB terutama Ibu dengan Resiko Tinggi pada 80 % kasus
6. Perbaikan Rujukan yang tepat waktu dengan mengurangi kasus keterlambatan rujukan dan merujuk sesuai kemampuan RS rujukan pada 100 % kasus.

Adapun arah dan strategi percepatan penurunan kematian ibu dan bayu baru lahir di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan cara pendekatan resiko yaitu pencegahan di hulu sebelum masuk gawat darurat, selanjutnya yang kedua adalah dengan pendekatan emergency yaitu melakukan penanganan adekuat di wilayah hilir. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini;

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2020

Gambar 4. Arah Strategi Percepatan Penurunan Kematian Ibu & BBL

Salah satu dari satuan tugas didalam struktur forum PENAKIB tersebut adalah satuan tugas pemberdayaan masyarakat dan kerjasama. Program kerja yang telah disusun dalam dokumen *action plan* adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi keberadaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang memiliki jaringan struktur organisasi secara vertikal sampai tingkat desa
2. Menghimpun organisasi kemasyarakatan dalam forum Penakib yang memiliki platform program kerja sama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
3. Melakukan monitoring atas pelaksanaan program yang dilakukan oleh anggota forum penakib
4. Melakukan evaluasi terkait ketercapaian dari pelaksanaan program tentang penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Keberadaan satuan tugas pemberdayaan masyarakat dan kerjasama adalah bagian dari unsur partisipasi masyarakat dalam rangka percepatan penanggulangan kematian ibu dan bayi baru lahir. Peranan dan partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat strategis, mengingat selama ini keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar. Eksistensi organisasi

kemasyarakatan dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat selama ini sudah banyak dilakukan dari berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan lainnya. Program pemberdayaan ini selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023, khususnya yang termaktub dalam misi yang kelima yaitu; "Meningkatkan pelayanan dasar terutama *pelayanan kesehatan*, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan" (Rizal, Tinus, & Widodo, 2018a).

Sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam sukses pencapaian RPJMD. Tujuan adanya partisipasi masyarakat ini disamping memperkuat legalitas suatu rezim pemerintahan, ada sisim lain yang lebih penting lagi yaitu bahwa nilai-nilai demokrasi dan adanya rasa memiliki atau *sence of belonging* terhadap makna kedaulatan rakyat benar benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa kebijakan partisipatif pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir sangat tepat. Hal ini dengan mempertimbangan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan menempati urutan ketiga tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak bisa sendirian menekan grafik tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir ini tanpa adanya kesadaran dari keluarga dan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya disinilah perlu adanya ruang keterlibatan masyarakat

melalui organisasi kemasyarakatan sangat urgen dan strategis dalam rangka memberikan edukasi dan sosialisasi serta memberikan informasi terhadap pentingnya perencanaan dalam rangka penanganan untuk mencegah kematian ibu dan bayi baru lahir. Forum Penakib adalah solusi sekaligus kebijakan partisipatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Forum Penakib adalah forum yang memungkinkan adanya sinergitas dan akselerasi lintas sector namun memiliki konsentrasi yang sama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan tidak merubah atau mencampur adukkan kapasitas dan fungsinya masing-masing.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.*, 8(1), 52.
- Arsyad, L. (2002). Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. In *Bpfe*.
- Fibriyani, V., & Mufidah, E. (2018). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kinerja UMKM di kota pasuruan. *Jurnal akuntansi*, 3(3), 873. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i3.190>
- Gischa, S. (2020). Otonomi Daerah: Definisi, Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1–315.
- Huda, K. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Heritage*, 2(2), 13.
- M, A. P. (2019). Inovasi Kebijakan Publik Dalam Perpektif Administrasi Publik. *Jurnal Meraja*, 2(3), 1–13.
- Mahluddin. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Kota Jambi : Kasus Pemerintah Daerah Kota Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan SMA di Kota Jambi. *Primary Education*, 1, 1–15.
- Moorman, C., Deshpande, R., & Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Research. *Journal of Marketing*, 57(1), 81–101.
- Nolen, R. S. (2006). Hoping for the best, preparing for the worst. *Journal of the American Veterinary Medical Association.*, 228(1), 11–12. <https://doi.org/10.1108/ijcma-03-2018-0040>
- Pemerintah RI. (2009). Undang-undang RI No.44. *Kementerian Sekretariat Negara*, Vol. 2, p. 255.
- Pribadiono, A. (2014). Pelayanan Publik dan Lembaga Ombudsman RI dalam Upaya Percepatan Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan. *Lex Jurnalica*, 11(2), 171–181.
- Rakhmawati, A., Rahardjo, K., & Kusumawati, A. (2019). Faktor Anteseden dan Konsekuensi Green Supply Chain Management. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*. <https://doi.org/10.21456/vol9iss1pp1-8>
- Rizal, S., Tinus, A., & Widodo, R. (2018a). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kabupaten Pasuruan Pembangunan Nasional merupakan. *Civic Hukum*, 102, 102–110.
- Rizal, S., Tinus, A., & Widodo, R. (2018b). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Bpjs Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Civic Hukum*, 3(1), 102. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7732>
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*.
- Simarmata, J. (2015). Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 (2), 1–34.